

ABSTRACT

Variation in the "level" of accrual is a phenomenon that occurs in the implementation of accrual basis accounting for the revenue recognition of Motor Vehicle Tax (MVT) in the Local Government of Yogyakarta Special Region and East Java. It is found especially in the mechanism of both Local Governments' revenue recognition of MVT. This research was conducted to explore and to analyze any factors that might explain the variation in the "level" of accrual using the descriptive qualitative method. The primary data were collected from interviews conducted in the Revenue Office of Finance and Assets Management (DPPKA) of the Provincial Government of Yogyakarta Special Region, in the Agency of Local Finance and Asset Management (BPKAD), and in the Local Revenue Agency (BPD) of East Java Provincial Government. The secondary data were obtained from the analysis of the accrual accounting policy for the revenue recognition – Operational Reports stipulated in the Government Regulation No. 71 of 2010 and in the Governor Regulation of each Local Government on Accounting Policy. All data were processed using a comparative analysis method. The results show that factors that might explain the variation in the "level" of accrual may derive from the internal and external organizations. The internal might be attributed to motivations, perceptions, and job satisfactions of each individual determining policy. In addition, personnel, leadership, technology, readiness, work assessment, improvement, and culture in the organization are other internal factors. The external can be attributed to the environment where the organization is located, as well as feedback from users of the financial statements made by the organization.

Keywords: variation in the "level" of accrual, revenue recognition, Motor Vehicle Tax (MVT), behavioral, local government

INTI SARI

Dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk pengakuan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan Jawa Timur (Jatim) terjadi fenomena berupa adanya variasi “kadar” akrual, khususnya pada mekanisme pengakuan pendapatan PKB di kedua pemda tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hal-hal yang menjadi penjelas terjadinya variasi “kadar” akrual tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Provinsi DIY, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun data sekunder diperoleh dari analisis terhadap kebijakan akuntansi akrual untuk pengakuan Pendapatan–LO yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur masing-masing pemda tentang Kebijakan Akuntansi. Data diolah dengan menggunakan metode analisis komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal penjelas terjadinya variasi “kadar” akrual dapat berasal dari internal dan eksternal organisasi. Hal-hal penjelas yang berasal dari internal berupa motivasi, persepsi, dan kepuasan kerja setiap individu penentu kebijakan serta personil, kepemimpinan, teknologi, kesiapan, penilaian kerja, *improvement*, dan budaya di organisasi tersebut. Sementara itu, hal-hal penjelas yang berasal dari eksternal dapat berupa lingkungan dan budaya tempat organisasi berada dan umpan balik dari pihak-pihak pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi.

Kata Kunci: variasi kadar akrual, pengakuan pendapatan, PKB, berperilaku, pemerintah daerah